

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi merupakan hal penting bagi suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan lembaga yang efektif dan efisien, lembaga harus bisa menghadapi setiap permasalahan ataupun hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.²

¹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), h. 32

²*Ibid.*, h. 32

Oleh karenanya, sebuah lembaga (komunikator) pada saat berkomunikasi harus membuat strategi terlebih dahulu agar pesan yang disampaikan bisa mencapai target komunikasi yang diinginkan. Begitupun halnya dengan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah dimana, KPI harus mampu membuat suatu strategi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi isi siaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI terdiri atas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran Indonesia meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.³

³<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia>, di akses Selasa, 31 Juli 2017, Jam 22.30.

KPI/KPID sebagai lembaga wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, KPI/KPID mempunyai wewenang yaitu: *Pertama*, Menetapkan standar program siaran, *Kedua*, Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, *Ketiga*, Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, *Keempat*, Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, *Kelima*, Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.⁴

Sebagai lembaga negara yang mengurus hal-hal menyangkut penyiaran, KPI khususnya KPID Sumsel memiliki satu misi yang diemban yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk itu KPID Sumsel melalui Bidang Kelembagaan mengemban tugas untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menonton siaran yang sehat dan mencerdaskan dengan mengadakan kegiatan media literasi.⁵

Berkaitan dengan itu, melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya anak-anak, remaja, dan perempuan (Pasal 48 ayat (4) butir e). Dengan kata lain, KPI wajib melindungi remaja dari pengaruh isi siaran.

⁴Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan, *Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: 2014), h. 45

⁵*Ibid.*, h. 44

Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui pembelajaran media (literasi media) kepada masyarakat, khususnya remaja, agar dapat melindungi diri dari pengaruh buruk pemberitaan di media.⁶

Pengertian *Media Literacy* itu sendiri adalah sebuah perluasan informasi dan keahlian berkomunikasi yang responsif terhadap perubahan zaman, terutama perubahan yang demikian cepat pada sektor informasi dan media sebagai pembawa pesan informasinya. Dalam tatanan praktis, *media literacy* berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format, termasuk di dalamnya format cetak maupun format noncetak, format analog, maupun format digital.⁷ Dalam hal ini literasi media merujuk kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa.⁸ Media Literasi ini pada intinya merupakan memberi edukasi dan pemahaman pada masyarakat tentang dunia media massa agar kritis dan selektif dalam menerima informasi dari media dan tidak mudah terpengaruh pesan dalam pemberitaan di media, baik media cetak, media elektronik (televisi dan radio) ataupun media internet.

Kemajuan media komunikasi modern tersebut dewasa ini telah memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (*channel*) yang dapat

⁶*Ibid.*, h. 46

⁷ Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Intruksional: teori dan praktek, Cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 26

⁸ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, Cet. 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 7

digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Radio dan televisi sebagai media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiensinya dalam jumlah yang sangat banyak.⁹

Televisi dan radio saat ini masih menjadi pilihan hiburan bagi sebagian besar orang di Indonesia. Meskipun telah lahir media baru berupa internet dalam bentuk media sosial dan *instant messenger* seperti Whatspp, Line, Instagram, program-program TV dan Radio tetap mendapat perhatian dari masyarakat.¹⁰ Berdasarkan survey yang dilakukan oleh AC Nielsen pada Tahun 2014, media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah TV, yakni sebanyak 95%. Sedangkan konsumsi media diurutkan kedua dan ketiga adalah internet 33% dan radio sebanyak 20%. Artinya TV dan Radio memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi masyarakat atau pemirsanya.

TV dan radio memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memberikan fungsi informasi dan hiburan yang tentunya diharapkan juga mendidik masyarakat.¹¹ Namun, akhir-akhir ini media khususnya televisi memberikan dampak yang negatif bagi para pemirsanya yaitu masyarakat. Dimana ada dalam siarannya yang *Pertama* mengandung unsur kekerasan, seperti menampilkan kekerasan secara berlebihan sehingga menimbulkan kesan Kekerasan dalam hal ini tidak saja dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal, seperti memaki dengan kata- kata kasar. *Kedua*, mengandung unsur mistik, yaitu

⁹Hidajanto Djamil dan Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, Ed. 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), h. 63

¹⁰Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, *Literasi Media: Cerdas dan Kritis Dalam Bermedia*, (Bandung: Deepublish, 2017), h.80

¹¹*Ibid.*, h. 80

menampilkan perilaku yang mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual mistik atau kontak dengan ruh. *Ketiga*, pelanggaran yang mengandung unsur pornografi, termasuk menampilkan cara berpakaian yang menonjolkan sensualitas. *Keempat*, kategori tayangan anak yang mengandung unsur perilaku negatif, seperti menyangkan sikap kurang ajar kepada orang tua atau guru dan menggambarkan penggunaan alkohol atau rokok. Bukan sampai disitu saja tayangan film maupun sinetron luar negeri seperti india, korea dan lain sebagainya turut meramaikan program acara yang ditayangkan di televisi Indonesia. Memang acara-acara tersebut sangatlah menarik akan tetapi dari segi edukatif tidak ada manfaat dan maknanya untuk memajukan pola pikir masyarakat. Anehnya tidak sedikit masyarakat menyukai program-program acara tersebut.

Padahal, dalam hal isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengatur isi siaran telah memiliki rambu-rambu yang wajib menjadi acuan bagi pengelola TV dan Radio dalam merancang program-programnya. Semua program TV dan Radio harus memperhatikan beberapa hal dalam mengemas isi program-programnya. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut meliputi penghormatan terhadap nilai-nilai agama, memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan, pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme, rasa hormat terhadap hak pribadi, penggolongan program menurut usia khalayak dan lain-lain.

Melihat fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan KPI/KPID Sumsel sebagai lembaga penyiaran harus memastikan program siaran yang hadir pada televisi dan radio harus memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Karena kenapa masyarakat pada saat ini belum banyak yang dapat memilah dan memilih muatan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat pada dirinya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat ini merupakan hal yang urgensi dan perlu penanganan yang serius. Disinilah peran KPI/KPID untuk memberi suatu edukasi pemahaman tentang pentingnya literasi media. Dimana KPI/KPID harus mampu membuat suatu strategi dalam mengkampanyekan Literasi Media pada masyarakat misalnya dengan mengadakan sosialisasi dengan menggunakan media pendukung sebagai sarannya ataupun dengan bentuk kegiatan lainnya. Sudah seharusnya KPI/KPID megalakkan program Literasi Media, hal ini dilakukan agar masyarakat mampu menilai informasi mana yang baik dan benar ataupun salah serta tidak mudah dibodohi lagi dan tepengaruh terhadap isi pemberitaan di media.

KPID Sumsel sendiri telah sering melaksanakan kegiatan media literasi dalam bentuk Seminar dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidang Media Literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meluaskan pemahaman tentang media literasi, mwmbangun sikap kritis terhadap media, mampu memanfaatkan media secara benar, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang penyairan sehingga aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui KPID

Sumsel dan sebagai wujud aktualisasi kerjasama mencapai siaran yang sehat dan bermatabat.¹²

Dari data dan fenomena di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang pengawasan penyiaran yang dilakukan berkaitan dengan *Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Mengoptimalkan Program Media Literasi Pada Masyarakat Sumatera Selatan.*

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam mengoptimalkan program Media Literasi pada Masyarakat Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan program Media Literasi pada Masyarakat Sumatera Selatan.

¹²Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan, *Laporan AKHIR Masa Jabatan (AMJ) Periode 2014-2017*, (Palembang: 2014), h. 31

2. Untuk mengetahui bentuk kegiatan apa yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan program Media Literasi pada Masyarakat Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penyiaran.
 - b. Penelitian ini berguna untuk mengetahui strategi dan kegiatan apa yang dilakukan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan program media literasi pada masyarakat Sumatera Selatan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan terhadap pengembang bidang penyiaran terhadap Program Media Literasi di Kota Palembang.
 - b. Memberikan deskripsi tentang strategi komunikasi KPID Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan program media literasi pada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian yang membahas tentang masalah KPI/KPID, ada beberapa hasil penelitian yang membahas KPI/KPID baik dalam peran, fungsi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu penelitian yang membahas tentang KPI adalah Trisnoto mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika yang berjudul, *Strategi Komunikasi KPID Provinsi Jawa Tengah Dalam Meminimalisasi Pelanggaran Isi Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Jawa Tengah Agustus 2014*.¹³ Skripsi ini menyimpulkan bahwa KPID Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan penyiaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Menggunakan media untuk mensosialisasi P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Menggunakan teknik komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Memberikan sanksi untuk memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran yang melanggar isi siaran. Memberikan penghargaan untuk memberikan apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang mematuhi Undang-undang penyiaran.

Selain itu juga ada Yesi Ratna Sari mahasiswi Universitas Riau, Jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014 yang melakukan penelitian tentang KPID yang berjudul, *Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Mengoptimalkan Program Media Literasi Terhadap Pemirsa Televisi Di Riau*.¹⁴ skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam mensosialisasikan literasi media oleh KPID Riau yaitu mencakup:

¹³Trisnoto, *Strategi Komunikasi KPID Provinsi Jawa Tengah Dalam Meminimalisasi Pelanggaran Isi Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Jawa Tengah Agustus 2014*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014).

¹⁴Yesi Ratna Sari, *Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Dalam Mengoptimalkan Program Media Literasi Terhadap Pemirsa Televisi Di Riau*, (Riau: Universitas Riau, 2014).

1) Mengenali sasaran komunikasi, KPID Riau tentunya mempunyai sasaran yang tepat agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. 2) Pemilihan media komunikasi, media yang digunakan KPID Riau dalam membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat pemirsa televisi di Riau mengenai literasi media. 3) Pengkajian tujuan pesan komunikasi, KPID Riau memiliki teknik untuk menyampaikan tujuan pesan komunikasi kepada sasaran, agar sasaran menerapkan dan mengikuti isi pesan yang diberikan komunikator. 4) Peranan komunikator dalam komunikasi terhadap daya tarik sumber dan kredibilitas sumber, KPID Riau dianggap berhasil apabila komunikator mengikuti dan menerapkan isi pesan yang diberikan, KPID Riau harus memiliki kredibilitas sumber agar komunikator dipercaya dan terpengaruh terhadap apa yang disampaikan komunikator. 5) Membentuk Komunitas Cerdas Media atau yang disingkat dengan (KCM) dan Keluarga Cinta Siaran Indonesia (KCSI). Kelompok ini dibentuk oleh KPID Riau sebagai perpanjangan tangan dalam memantau siaran, memberikan literasi media terhadap masyarakat, serta turut menjaga keseimbangan kelangsungan penyelenggaraan penyiaran. 6) Melakukan kerjasama dengan media elektronik, dan media massa sebagai bentuk penyebaran informasi. Seperti: Menggunakan iklan layanan masyarakat dan mengadakan *talk show interaktif* yang bekerjasama dengan radio – radio dan televisi lokal yang ada di Provinsi Riau. Serta bekerjasama dengan media Online dan media cetak untuk membuat iklan masyarakat yang berbentuk himbauan.

Selanjutnya, ada salah satu peneliti lagi yang membahas tentang KPID adalah Iripinsyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2016 yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Dalam Pengawasan Terhadap Sistem Penyiaran Di Kota Palembang*.¹⁵ Skripsi ini menyimpulkan bahwa Ditetapkan P3SPS itu agar lembaga penyiaran tidak semena-mena dalam memberikan tayangan kepada masyarakat dan juga KPID mempunyai acuan untuk mengetahui apakah penyiaran itu melakukan pelanggaran atau tidak dan apabila terbukti lembaga penyiaran melakukan pelanggaran maka KPI/KPID akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu P3SPS. Dalam penelitian ini tampak perbedaan dari ketiga penelitian diatas karena penelitian ini membahas tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Mengoptimalkan Media Literasi pada Masyarakat Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya

¹⁵Irpinsyah, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Dalam Pengawasan Terhadap Sistem Penyiaran Di Kota Palembang*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.¹⁶

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.¹⁷

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan didaerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.¹⁸

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN

¹⁶Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), h. 32

¹⁷*Ibid.*, h. 32

¹⁸Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *UU tentang penyiaran No. 32 Tahun 2002*, (Jakarta: 2010), h. 7

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.¹⁹

¹⁹ <http://www.kpi.go.id/profi-kpi> di akses Selasa, 31 Juli 2017, Jam 22.15

3. Media Literasi

Literasi Media berasal dari bahasa Inggris yaitu *Media Literacy*, terdiri dari dua suku kata *Media* berarti media tempat pertukaran pesan dan *Literacy* berarti melek, kemudian dikenal dalam istilah *Literasi Media*. Dalam hal ini literasi media merujuk kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa.²⁰

Pengertian *Media Literacy* itu sendiri adalah sebuah perluasan informasi dan keahlian berkomunikasi yang responsif terhadap perubahan zaman, terutama perubahan yang demikian cepat pada sektor informasi dan media sebagai pembawa pesan informasinya. Dalam tatanan praktis, *media literacy* berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format, termasuk di dalamnya format cetak maupun format noncetak, format analog, maupun format digital.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan.

²⁰Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, Cet. 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 7

²¹Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Intruksional: teori dan praktek, Cet.1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 26

Dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *injury* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²²

b. Sumber Data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara dan melakukan pengamatan tentang analisis strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam mengoptimalkan program media literasi pada masyarakat Sumatera Selatan.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. Wakil Ketua KPID Sumsel Bapak Eftiyani, SH.
- b. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumsel Bapak Rahmad Fadila, M.Si

2) Data Sekunder

Dalam penelitian data diperoleh dari berbagai dokumen atau arsip dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan, internet, berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

²²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 328

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²³

Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan maka wawancara dapat dikategorikan atas tiga bentuk, yaitu:

1) Wawancara terencana-terstruktur

Adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.

2) Wawancara terencana-tidak terstruktur

Adalah apabila peneliti/ pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

²³*Ibid.*, h. 372

3) Wawancara bebas

Adalah wawancara bebas berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman oleh suatu format yang baku.²⁴

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas tetapi runtut dan terarah.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. Wakil Ketua KPID Sumsel Bapak Eftiyani, SH.
- b. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumsel Bapak Rahmad Fadila, M.Si

b. Observasi

Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin “*melihat*” dan “*memerhatikan*”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tertentu.²⁵

Apabila kita mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) *Participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.
- 2) *Non-participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan

²⁴*Ibid.*, h. 376-377

²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 143

kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.²⁶

Dalam observasi ini penulis mendeskripsikan fakta secara akurat, dan terperinci mengenai keadaan dilapangan. Hanya saja peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita.²⁷

Dalam dokumentasi ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku mengenai program kerja, buku anggota, struktur organisasi serta arsip lainnya yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*ongoing*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap

²⁶A. Muri Yusuf, *Op. Cit.*, h.384

²⁷*Ibid.*, h. 391

terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang dikumpul, baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara kritis analisis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan kebasahan data secara kontinu.

Fossey, mengemukakan batasan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif. Ia menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses meriview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergilir dan peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data, dan kesimpulan/ verifikasi.

Adapun spradley secara lugas menyatakan, bahwa analisis adalah cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada prinsipnya analisis adalah untuk mencari pola tentang sssuatu yang diteliti.²⁸

²⁸*Ibid.*, h. 400

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari:

- BAB I** Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian.
- BAB II** Landasan teori tentang strategi komunikasi, KPID Sumsel, Media literasi dan Masyarakat.
- BAB III** Merupakan deskripsi wilayah yang meliputi alamat kantor KPID Sumsel, visi dan misi KPID Sumsel, dasar pembentukan KPID Sumsel, fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajiban KPID Sumsel, pembedangan dan program kerja KPID Sumsel dan Struktur Keanggotaan KPID Sumsel.
- BAB IV** Analisis dan pembahasan yang meliputi strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan program media literasi pada masyarakat Sumatera Selatan.
- BAB V** Merupakan isi pokok dan penutupan yang meliputi : kesimpulan, saran, dan lampiran.